

# LAPORAN KINERJA

**SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR**

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN & INVESTASI**

**TRIWULAN III**

**2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Triwulan III Tahun 2020 ini. Laporan ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas untuk mewujudkan transparansi dalam penggunaan dana publik. Laporan juga sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas komitmen yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja TA. 2020 guna pencapaian visi dan misi Sekretariat Kementerian Koordinator.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator periode Triwulan III 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja didasarkan pada target kinerja pada sebuah instansi yang telah dinyatakan dalam dokumen perjanjian kinerja. Perubahan SOTK telah menyebabkan banyaknya hal yang harus disesuaikan termasuk juga perjanjian kinerja dikarenakan terdapat penambahan unit. Sehingga mayoritas target kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator ditargetkan pada triwulan akhir (triwulan IV)

Dalam Laporan ini disampaikan mengenai capaian kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani yang meliputi 9 (Sembilan) Sasaran Strategis dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama.

Dengan tersusunnya laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2020 ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai perkembangan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peningkatan kinerja organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator. Kami mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan ke depan.

Jakarta, Oktober 2020  
Sekretaris Kementerian  
Koordinator,

**Agung Kuswandono**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Setmenko Marves) diukur berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Setmenko Marves Tahun 2020. Perjanjian Kinerja tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Perencanaan Kinerja disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Setmenko yaitu membantu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang (Kemenko) Marves.

Dalam mencapai tujuannya, Kemenko Marves telah mengadopsi sistem *Balanced Scorecard* sebagai metode/alat bantu dalam pengelolaan dan pengukuran kinerja. Pencapaian kinerja Setmenko diukur dengan Indikator Kinerja (IK) yang dirinci sesuai target setiap tahunnya. Indikator Kinerja merupakan ukuran kinerja hasil (*outcome*) yang dihasilkan pada unit kerja eselon I atau melalui kinerja keluaran (*output*) dari unit kerja eselon II dibawahnya yaitu berupa indikator kinerja kegiatan.

Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terdiri 13 Sasaran Strategis (SS) dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis tersebut terbagi dalam 4 perspektif yaitu:

1. Stakeholders Perspective (terdiri dari 1 SS dan 1 IKU)
2. Customer Perspective (terdiri dari 5 SS dan 5 IKU)
3. Internal Business Process Perspective (terdiri dari 4 SS dan 9 IKU)
4. Learning & Growth Perspective (terdiri dari 3 SS dan 4 IKU)

Capaian kinerja Setmenko TA. 2020 secara umum ditargetkan untuk dicapai pada triwulan terakhir (triwulan IV). Capaian kinerja pada triwulan ini adalah capaian progres hingga periode waktu triwulan III 2020.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.    Kedudukan, Tugas dan Fungsi .....	1
1.2.    Organisasi dan Personalia .....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
2.1.    Sasaran Strategis.....	5
2.2.    Indikator dan Target Kinerja .....	7
2.3.    Program dan Kegiatan.....	9
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
3.1.    Capaian Kinerja Organisasi .....	12
3.2.    Capaian Kinerja Unit .....	12
1.    Stakeholder Perspective .....	13
2.    Customer Perspective .....	13
3. <i>Internal Business Process Perspective</i> .....	13
4. <i>Learning and Growth Perspective</i> .....	13
3.3.    Capaian Kinerja .....	13
Sasaran Strategis 1 .....	17
Sasaran Startegis (SS) 2 .....	19
Sasaran Strategis (SS) 3 .....	20
Sasaran Staretegis (SS) 4 .....	21
Sasaran Strategis (SS) 5 .....	23
Sasaran Strategis (SS) 6 .....	24
Sasaran Strategis (SS) 7 .....	25
Sasaran Strategis (SS) 8 .....	27
Sasaran Strategis (SS) 9 .....	30
Sasaran Strategis (SS) 10 .....	31
Sasaran Strategis (SS) 11 .....	32
Sasaran Strategis (SS) 12.....	33
Sasaran Strategis (SS) 13.....	34
Kinerja Keuangan.....	35
BAB IV PENUTUP .....	36
LAMPIRAN .....	38

## BAB I PENDAHULUAN

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2019-2024. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka Setmenko Marves mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Marves.

Mengingat Pelaksanaan tugas Setmenko Marves belum efektif berjalan dikarenakan menunggu pengesahan DIPA yang baru, maka Laporan Kinerja Triwulan III ini akan disajikan berdasarkan tugas yang diatur dalam Peraturan Presiden No 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Untuk merealisasikan tugas dan fungsi tersebut, selama periode Maret 2020 Setmenko telah melakukan beberapa kegiatan. Berbagai kegiatan tersebut diadakan dengan maksud agar dapat membantu dan mengawal tugas dan fungsi Kemenko Marves sehingga target kinerja dapat tercapai.

Sebagai bentuk penyebaran informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, maka disusunlah laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Setmenko Triwulan III Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. Melalui laporan ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja Setmenko sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

### 1.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kementerian Koordinator adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator

Bidang Kemaritiman dan Investasi yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Sekretariat Kemenko Kemaritiman;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Sekretariat Kemenko Bidang Kemaritiman;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Sekretariat Kemenko Bidang Kemaritiman;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

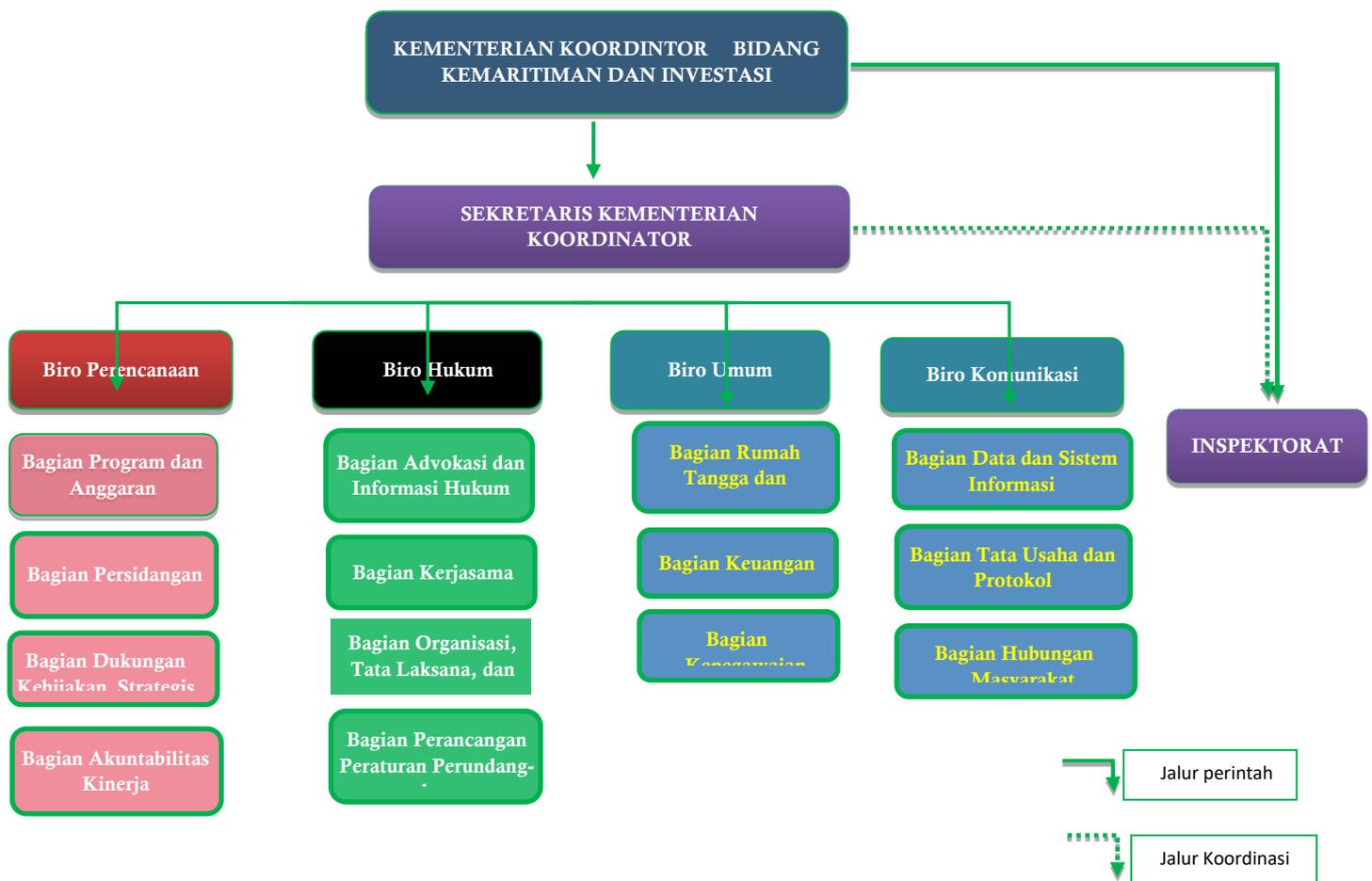
## 1.2. Organisasi dan Personalia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terdiri dari:

1. **Biro Perencanaan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi: penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemberian dukungan kebijakan strategis; pengelolaan akuntabilitas kinerja; pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi; pelaksanaan hubungan masyarakat; fasilitasi persidangan Menteri Koordinator; serta serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris kementerian Koordinator.
2. **Biro Hukum** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi: penyusunan peraturan perundang-undangan dan hukum; penyiapan naskah perjanjian; penelaahan dan bantuan hukum; pelaksanaan administrasi kerja sama; pemberian dukungan reformasi birokrasi; pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris kementerian Koordinator.
3. **Biro Komunikasi** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan ketatausahaan, keprotokolam, hubungan masyarakat dan pengelolaan data dan system informasi di lingkungan Kementerian Koordinator
4. **Biro Umum** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi: pengelolaan ketatausahaan; kepegawaian; keuangan; perlengkapan; kerumahtanggaan;

persuratan; kearsipan; keprotokolan; pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; layanan pengadaan barang/jasa; serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

5. **Inspektorat** mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kematriman. Inspektorat dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kematriman.
6. **Staf Ahli Menteri** mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator Bidang Kematriman sesuai keahliannya



**Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat Kemenko MARVES**

Dalam struktur organisasi Kemenko Bidang Kematriman dan Investasi, sesuai dengan Permenko Nomor 2 tahun 2020, Inspektorat di bawah perintah langsung Menteri Koordinator. Namun dalam operasional dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Kementerian Koordinator. Sehingga dalam

penyajian Laporan Kinerja Sekretaris Kementerian ini memasukan capaian kinerja yang dihasilkan/menjadi tanggungjawab Inspektorat.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan Menteri Koordinator sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Pada tingkat Sekretariat Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi diimplementasikan dalam pernyataan Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta perjanjian kinerja para Kepala Biro. Strategi pencapaiannya digambarkan pada peta strategi Setmenko Kemaritiman sebagai target kinerja yang ditetapkan dan akan direalisasikan secara berkala pada periode masing-masing.

### 2.1. Sasaran Strategis

Instansi pemerintah harus memiliki sasaran kerja yang harus dicapai secara spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam proses mencapai sasaran diberikan indikator sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tenggang waktu yang telah ditargetkan.

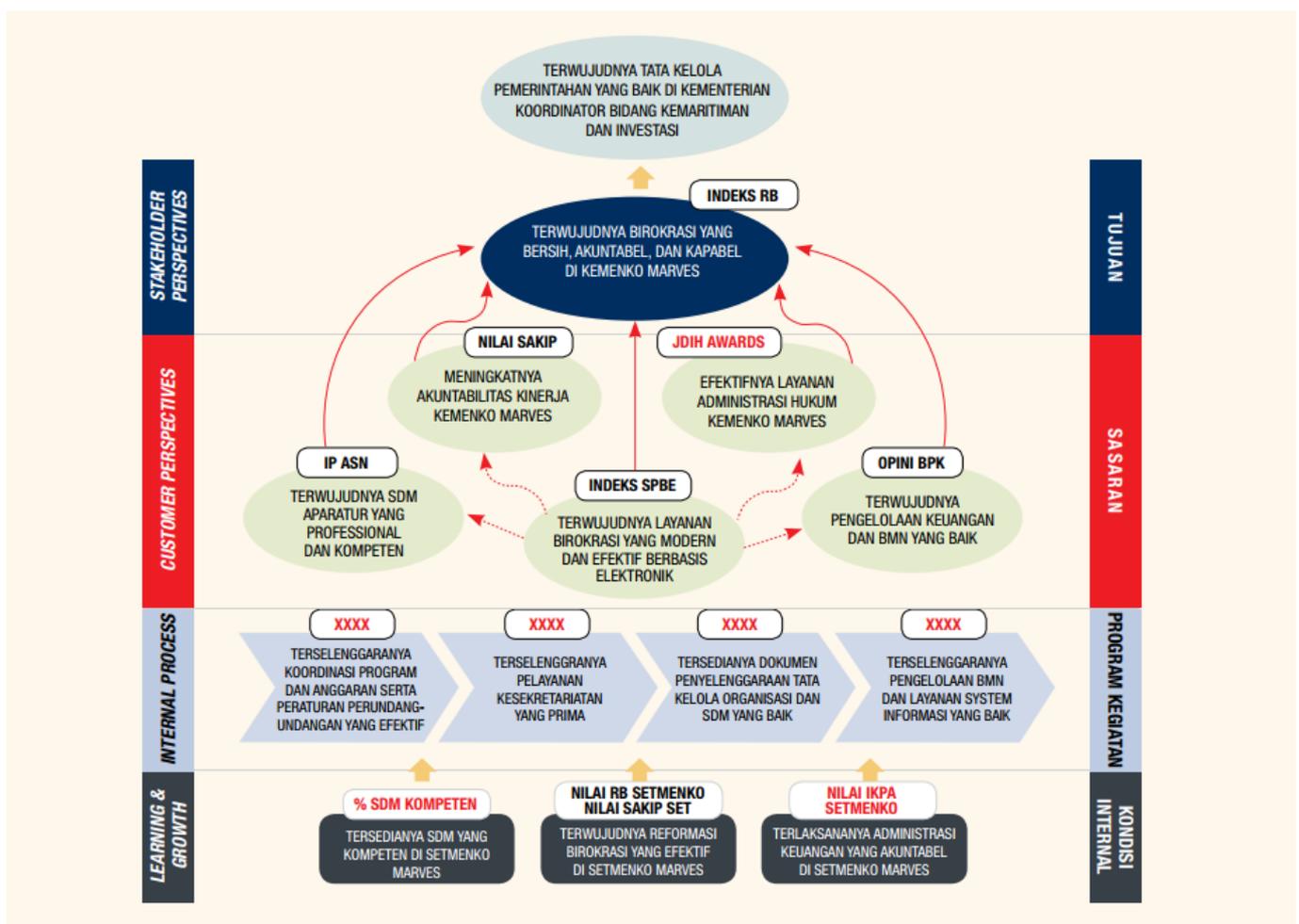
Target kinerja tahun 2020 dijabarkan melalui tahapan-tahapan dan target kinerja triwulanan Setmenko Kemaritiman dan Investasi. Sasaran Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 1 Sasaran Strategis Setmenko 2020**

SASARAN STRATEGIS	
<b><i>Stakeholders Perspective</i></b>	
<b>SS.1</b>	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Kapabel di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
<b><i>Customer Perspective</i></b>	
<b>SS.2</b>	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
<b>SS.3</b>	Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Efektif dan Harmonis
<b>SS.4</b>	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang <i>Modern</i> dan Efektif Berbasis Elektronik
<b>SS.5</b>	Tersedianya SDM Aparatur Yang Profesional dan Kompeten
<b>SS.6</b>	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
<b><i>Internal Business Process Perspective</i></b>	
<b>SS.7</b>	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Program & Anggaran serta Peraturan Perundang - Undangan yang Efektif
<b>SS.8</b>	Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan yang Prima

<b>SS.9</b>	Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Baik
<b>SS.10</b>	Terseleenggaranya Pengelolaan BMN dan Layanan Sistem Informasi yang Baik
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>	
<b>SS.11</b>	Tersedianya SDM yang Kompeten di Setmenko Marves
<b>SS.12</b>	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Setmenko Marves
<b>SS.13</b>	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Setmenko Marves

Berdasarkan sasaran program seperti yang telah disusun di atas maka peta strategis Setmenko Kemaritiman disusun sebagai berikut:



Gambar 2 Peta Strategis Setmenko 2020

## 2.2. Indikator dan Target Kinerja

Sesuai dengan perjanjian kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ditetapkan target kinerja tahun 2019. Target kinerja ini terdiri dari sasaran program serta indikator kinerja tahun 2019. Tidak semua sasaran program ditargetkan untuk direalisasikan pada Tahun Anggaran 2019.

Adapun rincian target kinerja (sasaran) Setmenko Kemaritiman dan Investasi TA. 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Rincian Target Kinerja Setmenko 2020**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUNAN
<b>Stakeholders Perspective</b>				
<b>SS.1</b>	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Kapabel di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	1	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	75
<b>Customer Perspective</b>				
<b>SS.2</b>	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	2	Nilai SAKIP Kemenko Marves	70
<b>SS.3</b>	Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Efektif dan Harmonis	3	Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang – Undangan	3.5
<b>SS.4</b>	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang <i>Modern</i> dan Efektif Berbasis Eelektronik	4	Indeks SPBE	3
<b>SS.5</b>	Tersedianya SDM Aparatur Yang Profesional dan Kompeten	5	Indeks Profesionalitas ASN	71
<b>SS.6</b>	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	6	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
<b>Internal Business Process Perspective</b>				
<b>SS.7</b>	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Program & Anggaran serta Peraturan Perundang - Undangan yang Efektif	7	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Program yang Sesuai dengan Ketentuan	100
		8	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diharmonisasi pada Tahun Berjalan	100
<b>SS.8</b>	Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan yang Prima	9	Persentase Sistem Layanan Kepegawaian yang Baik	80

		10	Persentase Penyelesaian Tagihan atas Beban Negara yang Tepat Waktu	95
		11	Persentase Opini Publik yang Positif	70
		12	Persentase Pengadaan Barang & Jasa yang Tepat Waktu	100
<b>SS.9</b>	Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Baik	13	Jumlah Pedum Manajerial yang Ditetapkan	>=5
<b>SS.10</b>	Terselenggaranya Pengelolaan BMN dan Layanan Sistem Informasi yang Baik	14	Persentase Tingkat Ketaatan Penyampaian Laporan Barang Milik Negara	100
		15	Pemenuhan Kebutuhan Minimal Aplikasi Umum yang Terintegrasi Lingkup Kemenko Marves	4
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>				
<b>SS.11</b>	Tersedianya SDM yang Kompeten di Setmenko Marves	16	Persentase SDM yang Kompeten	75
<b>SS.12</b>	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Setmenko Marves	17	Nilai PMPRB Setmenko	70
		18	Nilai SAKIP Setmenko	75
<b>SS.13</b>	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Setmenko Marves	19	Nilai IKPA Setmenko	95

Penghitungan capaian kinerja adalah dengan membandingkan nilai realisasi capaian dengan target yang ditetapkan. Khusus untuk realisasi yang capaiannya lebih 120% dari target, akan disampaikan/dilaporkan 120%. Hal ini ditetapkan dengan alasan agar unit pelaksana kegiatan dapat merencanakan target kinerja dengan lebih cermat dan sesuai dengan kelayakan berdasarkan kemampuan personil dan anggaran yang ada.

Perhitungan capaian dari realisasi kinerja dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Menghitung capaian IKU:

- a. Penghitungan capaian IKU dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
  - Tingkat kendali dan tingkat validitas suatu IKU, dengan komposisi bobot sebagai berikut:

**Tabel 3 Komposisi bobot IKU terhadap Tingkat Kendali dan Tingkat Validitas**

Jenis IKU	Exact	Proxy	Activity
High	13.33	8.33	5.00
Moderate	15.00	10.00	6.67
Low	18.33	13.33	10.00

- Bukti hasil kinerja, dengan komposisi bobot sebagai berikut:

**Tabel 4 Bobot Bukti Hasil Kinerja**

Kategori Penilaian	Bobot
Sesuai	100
Belum Relevan	50
Tidak Sesuai	0

- b. Menghitung persentase capaian Indikator Kinerja Utama, yaitu dengan membagi capaian berbanding targetnya

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$$

- c. Menghitung persentase capaian final IKU, yaitu dengan mengalikan Capaian IKU dengan Data Dukung (evidence)

$$\text{Capaian Final IKU} = \text{Capaian IKU} \times \text{Data Dukung}$$

2. Menghitung capaian Sasaran Strategis

Penghitungan didapatkan dengan perkalian antara capaian final IKU dan bobot final kemudian dibagikan terhadap total bobot final IKU per SS yang ada targetnya

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Capaian Final IKU} \times \text{Bobot Final IKU}}{\text{Total bobot final IKU yang ada targetnya per SS}}$$

3. Perspektif didapat dari hasil perkalian capaian sasaran dan bobot sasaran kemudian dibagi terhadap total bobot sasaran per perspektif

$$\text{Perspektif} = \frac{\text{Capaian Sasaran} \times \text{Bobot Sasaran}}{\text{Total bobot sasaran per Perspektif}}$$

4. Capaian Kerja Unit dihasilkan dari perkalian capaian perspektif dengan bobot perspektif yang dibagi terhadap total bobot perspektif

$$\text{Capaian kerja Unit} = \frac{\text{Capaian Perspective} \times \text{Bobot perspective}}{\text{Total bobot perspective}}$$

### 2.3. Program dan Kegiatan

Setmenko Kemaritiman dan Investasi dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator dengan visi “**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi**” mempunyai tanggung jawab sesuai Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2020 tentang Kemenko Marves yaitu koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Marves.

Sasaran strategis Sekretariat Kemenko Marves seperti yang disampaikan adalah:

1. Terwujudnya ASN Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Profesional
2. Terwujudnya organisasi dan tata kelola Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang baik

3. Tersedianya sistem informasi manajemen Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang terintegrasi
4. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel

Dalam mewujudkan ASN Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Profesional, arah kebijakan yang diambil adalah:

1. Pemenuhan SDM yang memenuhi standar kompetensi
2. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk kebutuhan untuk seluruh pegawai
3. Penyusunan nilai faktor jabatan terkait penetapan kelas jabatan masing masing jabatan
4. Penyusunan dokumen pengembangan SDM
5. Pelaksanaan assesment seluruh pejabat struktural, fungsional serta staf
6. Penilaian evaluasi jabatan baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional
7. Pelaksanaan survey online dan FGD terkait pembangunan budaya kerja

Dalam mewujudkan Organisasi dan Tata Kelola Kemenko Marves yang Baik, arah kebijakan yang diambil adalah:

1. Mendorong peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran dengan menerapkan kebijakan pelaksanaan anggaran antara lain:
  - a. Meningkatkan akurasi perencanaan anggaran;
  - b. Meningkatkan disiplin pelaksanaan anggaran;
  - c. Meningkatkan integritas dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran;
  - d. Membangun aplikasi sistem pemantauan pelaksanaan anggaran berbasis TIK.
2. Mendorong penerapan SAKIP lingkup Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, melalui kebijakan:
  - a. Penetapan Entitas Akuntabilitas Kinerja sampai unit Eselon II;
  - b. Penerapan Perjanjian Kinerja untuk pejabat struktural, pejabat fungsional, hingga ke seluruh staf
  - c. Implementasi sistem Balanced Scorecard (BSC) dalam pengelolaan kinerja untuk peningkatan area akuntabilitas kinerja Kemenko Marves
  - d. Menyiapkan Sistem Pelaporan berbasis sistem aplikasi online;
3. Menyusun dokumen-dokumen terkait penyelenggaraan organisasi kementerian dan reformasi birokrasi
4. Pelaksanaan survei internal dan eksternal terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan kebijakan publik Kemenko Marves. Peningkatan jumlah pemberitaan kementerian di media nasional dan internasional sebagai bentuk keterbukaan informasi publik

Dalam mewujudkan Sistem Informasi Manajemen Kemenko Marves yang Terintegrasi, arah kebijakan yang diambil adalah:

1. Peningkatan pengelolaan sumber daya berbasis IT
2. Peningkatan pelayanan teknologi informasi yang terintegrasi
3. Peningkatan penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang andal
4. Penyediaan aplikasi sistem informasi yang dapat mendukung proses bisnis di Kemenko Marves dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

maka arah kebijakan adalah untuk penguatan tata kelola keuangan dan BMN dalam rangka mempertahankan opini WTP.

Pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2019 didukung dengan anggaran dana sebagai berikut:

Unit Kerja	Anggaran Awal	Revisi Anggaran	Anggaran Akhir
Biro Umum	(137.792.027.000)	(22.560.900.000)	(160.352.927.000)
Biro Perencanaan	(23.015.367.000)	6.060.900.000	(16.954.467.000)
Biro Hukum	(7.050.796.000)	620.000.000	(6.430.796.000)
Inspektorat	(4.000.000.000)	710.000.000	(3.290.000.000)
Staff Ahli	(1.483.454.000)	240.000.000	(1.243.454.000)
	(173.341.644.000)	(14.930.000.000)	(188.271.644.000)

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah kinerja keseluruhan yang terdiri dari berbagai unit kerja dengan tanggung jawab masing-masing pada Sekretariat Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Pengukuran nilai/angka capaian kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dihitung dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator.

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sekretariat Kemenko selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan yang dihadapi.

Mengacu kepada ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Sekretariat Kemenko diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan. Berikut capaian kinerja sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Capaian kinerja yang telah dicapai Sekretariat Kemenko selama tahun 2020 sampai dengan triwulan III, belum dapat dijelaskan secara kuantitatif mengingat seluruh kinerja ditargetkan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2020. Progres capaian kinerja sampai dengan Triwulan III dapat dipantau melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing indikator yang telah tertuang dalam rencana aksi Sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Kemenko Tahun 2020-2024 Serta Perjanjian Kinerja Sekretariat Kemenko Tahun 2020 sebanyak 13 sasaran strategis dan 19 masing-masing indikator telah dicascading kepada masing-masing unit kerja dibawahnya, yakni pada Biro Perencanaan, Biro Hukum, Biro Umum dan Biro Komunikasi.

### 3.2. Capaian Kinerja Unit

Formulasi penghitungan nilai capaian kinerja unit adalah hasil dari perkalian capaian perspektif dengan bobot perspektif yang kemudian dibandingkan terhadap total bobot perspektif.

Capaian kerja Unit=

$$\frac{\text{Capaian Perspective} \times \text{Bobot perspective}}{\text{Total bobot perspective}}$$

### **1. Stakeholder Perspective**

Stakeholder Perspective memiliki 1 (satu) SS dan 1 (satu) IKU. Ditargetkan pada triwulan IV. Capaian kinerja pada Perspective ini merupakan capaian kinerja utama yang mendukung capaian IKU Menko pada Learning and Growth Perspective. Pada dasarnya indikator kinerja pada perspective ini menunjukkan upaya internal dalam mendukung pelaksanaan Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam bentuk layanan yang diberikan

### **2. Customer Perspective**

Customer Perspective memiliki 5 (lima) SS dan 5 (lima) IKU. Secara umum, perspektif ini ditargetkan tercapai pada triwulan IV. Kinerja yang dibahas dalam laporan ini adalah kinerja yang mendukung pada pencapaian Terwujudnya Birokrasi yang bersih, akuntabel dan kapabel di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dukungan tersebut berasal dari capaian kinerja masing-masing Biro lingkup Sekretariat Kemenko yaitu Biro Perencanaan, Biro Hukum, Biro Umum dan Biro Komunikasi. Hal ini karena indikator Sasaran pada perspective ini telah dibagi habis kepada seluruh unit kerja dibawahnya.

### **3. Internal Business Process Perspective**

Perspective ini memiliki 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) IKU. Internal business process Perspective merupakan capaian kinerja yang membentuk kinerja yang ada pada customer perspective yang dilaksanakan oleh masing-masing Biro. Kinerja pada perspective ini juga ditargetkan tercapai pada Triwulan IV.

### **4. Learning and Growth Perspective**

Terdapat 3 SS dan 3 IKU pada perspective ini. Perspective ini menggambarkan upaya internal dalam mendukung setiap layanan yang diberikan oleh Sesmenko.

## **3.3. Capaian Kinerja**

Sekretariat Kemenko Marves mempunyai sasaran yang digunakan sebagai ukuran tingkat keberhasilan kinerja. Pencapaian sasaran diwujudkan pada tenggang waktu yang telah ditargetkan. Berdasarkan hal tersebut maka disusun sasaran strategis Sekretariat Kemenko Marves dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2020, sasaran strategis ditargetkan untuk direalisasikan pada 4. Sasaran Strategis Semenke tersebar dalam beberapa perspective sebagai berikut:

#### **Stakeholders Perspective**

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan kapabel di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

### Customer Perspective

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
3. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Efektif dan Harmonis
4. Terwujudnya layanan birokrasi yang modern dan efektif Berbasis Eelektronik
5. Tersedianya SDM aparatur yang professional dan kompeten
6. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

### Internal Business Process Perspective

7. Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Program & Anggaran serta Peraturan Perundangan yg Efektif
8. Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan yang prima
9. Tersedianya dokumen penyelenggaraan tatakelola Organisasi dan SDM yang baik
10. Terselenggaranya pengelolaan BMN dan layanan sistem informasi yang baik

### Learning & Growth Perspective

11. Tersedianya SDM yang kompeten di Setmenko Marves
12. Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang efektif di Setmenko Marves
13. Terlaksananya administrasi keuangan yang akuntabel di Setmenko Marves

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka perjanjian kinerja dilakukan pada setiap unit kerja termasuk Sekretariat Kemenko. Berdasarkan perjanjian kinerja ini ditetapkan target kinerja tahun 2020. Target kinerja ini terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja utama serta target selama tahun 2020 serta per Triwulan 2020. Tidak ada Sasaran Strategis yang ditargetkan terealisasi pada Triwulan III. Namun progres pencapaian dapat dijelaskan melalui progres kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian masing-masing indikator sebagaimana tertuang dalam rencana aksi.

Formulasi penghitungan nilai capaian kinerja unit adalah hasil dari perkalian capaian perspektif dengan bobot perspektif yang kemudian dibandingkan terhadap total bobot perspektif.

$$\left( \text{Capaian kerja Unit} = \frac{\text{Capaian Perspective} \times \text{Bobot perspective}}{\text{Total bobot perspective}} \right).$$

Capaian ini belum dapat dihitung pada Triwulan III 2020, sehingga tabel capaian dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 5 Capaian Kinerja Sekretariat Kemenko Triwulan III TA. 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel dan Kapabel di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	75	-	-
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi	Nilai SAKIP Kemenko Marves	70	-	-
Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kemaritiman & Investasi yang Efektif & Harmonis	Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang-undangan	3.5	-	-
Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3	-	-
Tersedianya SDM Aparatur yang Profesional & kompeten	Indeks Profesionalitas ASN	71	-	-
Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	-	-
Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran serta Peraturan Perundangan yang Efektif	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Program yang Sesuai Ketentuan	100	-	-
	Persentase Peraturan Perundangan yang Diharmonisasi pada Tahun Berjalan	100	-	-
Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan yang Prima	Persentase Sistem Layanan Kepegawaian yang Baik	80	-	-
	Persentase Penyelesaian Tagihan atas Beban Negara yang Tepat Waktu	95	-	-
	Persentase Opini Publik yang Positif	70	-	-
	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang Tepat Waktu	100	-	-
Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Baik	Jumlah Pedum Manajerial yang Ditetapkan	≥5	-	-
Terselenggaranya Pengelolaan BMN dan Layanan Sistem Informasi yang Baik	Persentase Tingkat Ketaatan Penyampaian Laporan BMN	100	-	-
	Pemenuhan Kebutuhan Minimal Aplikasi Umum yang Terintegrasi Lingkup Kemenko Marves	4	-	-
Tersedianya SDM yang Kompeten di Setmenko Marves	Persentase SDM yang Kompeten	75	-	-
Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Setmenko Marves	Nilai PMPRB Setmenko	70	-	-
	Nilai SAKIP Setmenko	75	-	-
Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Setmenko Marves	Nilai IKPA Setmenko	95	-	-

Jumlah sasaran Strategis (SS) dan indikator kinerja Utama (IKU) Setmenko Kemaritiman dan Investasi pada TA. 2020, lebih banyak dibanding tahun 2019. Jika di TA. 2019 hanya ada 10 Sasaran Program dan 21 IKP, maka pada tahun 2020 terdapat 13 SS dan 19 IKU. Pada tahun 2019 Triwulan III memiliki nilai capaian 106,49% dengan 17 Indikator Kinerja telah memiliki capaian pada triwulan tersebut. Pada tahun 2019, hingga akhir Triwulan III, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah memiliki capaian kinerja total 88,34% dari target tahunan yang ditargetkan. Berikut adalah capaian kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator kumulatif pada Triwulan III TA 2019:

Tabel 6 Capaian Kinerja Kumulatif Triwulan III TA. 2019

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
<b>Customer Perspective</b>						<b>96,71</b>
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemenko Kemaritiman	1	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	75	65,95	93,71
		2	Nilai evaluasi SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	70	66,99	97,85
		3	Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	1,80	95,00
		4	Tingkat opini BPK	WTP	WTP	100
		5	Indeks Maturitas SPIP Kemenko Bidang Kemaritiman	-	-	-
<b>Internal Business Process Perspective</b>						<b>100,99</b>
2	Tersedianya Teknologi Informasi Komunikasi yang andal di Kemenko Kemaritiman	6	Persentase Kepuasan Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data dan Informasi	-	-	-
3	Meningkatnya Layanan Kehumasan	7	Persentase Publikasi	70	108,52	110,85
		8	Persentase Opini Publik yang Positif	70	79,00	106,43
		9	Persentase Layanan Dokumentasi	70	132,85	120
4	Tersedianya layanan persidangan yang efektif	10	Persentase kepuasan layanan persidangan	80	87	104,38
5	Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi	11	Persentase Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	80	77,66	98,54
		12	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pertimbangan dan Bantuan Hukum	80	93,33	108,33
		13	Persentase Pemenuhan SOP Tata Laksana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	80	61,22	79,93
6	Terwujudnya pengelolaan sumber daya manusia dan BMN yang Handal	14	Persentase Pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	-	-	-

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian
		15	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Sesuai Standar Kebutuhan Pegawai Kemenko Bidang Kemaritiman	70	70,10	100,07
7	Terwujudnya sistem perencanaan dan kinerja pelaksanaan anggaran yang akurat	16	Persentase penerapan SAKIP di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	-	-	-
		17	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran	90	93,38	101,88
		18	Persentase konsistensi perencanaan terhadap pelaksanaan kinerja	90	96,38	103,54
8	Tersedianya Dokumen dan/atau Rancangan Administrasi untuk Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	19	Jumlah Kebijakan / Rancangan Kebijakan Manajerial yang Dihasilkan	9	9	100
<b>Learning and Growth</b>						<b>100</b>
9	Organisasi dan tata kelola yang baik di Setmenko	20	Nilai evaluasi AKIP Sekretariat Kementerian Koordinator	70	64,37	95,58
10	Pengelolaan anggaran yang optimal dan akuntabel di Setmenko	21	Persentase tindak lanjut rekomendasi APIP atas laporan keuangan dan BMN	100	100	100
<b>Capaian Kinerja Setmenko s.d Triwulan III 2019</b>						<b>99,28</b>

Sementara pada Tahun 2020 terdapat kendala dalam mencapai target kinerja setiap unit dikarenakan terjadinya perubahan SOTK pada tubuh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sehingga penyusunan dan perubahan target kinerja masing masing unit perlu untuk dikaji sehingga setiap unit melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan bidang sumber daya yang telah dimiliki. Tahun 2020 target capaian Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ditargetkan untuk dicapai pada triwulan akhir (Triwulan IV). Penjelasan dan rincian dari masing-masing Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

### Sasaran Strategis 1

#### Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel dan Kapabel di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi

Pengertian sasaran strategis ini adalah terlaksananya peningkatan akuntabilitas pemerintahan, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sasaran strategis 1 (SS.1) ini dijabarkan melalui 1 IKU yaitu sebagai berikut:

### **IKU 1 yaitu Indeks Penilaian Mandiri Pengelolaan Reformasi Birokrasi**

Persentase ini adalah nilai implementasi pengelolaan RB pada 8 agenda perubahan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Target tahunan indikator kinerja ini adalah mendapatkan nilai 75. IK ini ditargetkan pencapaiannya di Triwulan IV TA. 2020.

Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pelaksanaan 8 agenda perubahan yaitu: a) manajemen perubahan; b) penataan peraturan perundang-undangan; c) penataan dan penguatan organisasi; d) penataan tatalaksana; e) penataan sistem manajemen; f) penguatan akuntabilitas; g) penguatan pengawasan; dan h) peningkatan kualitas pelayanan publik.

### **Capaian Kinerja Stakeholder Perspective s.d Triwulan III**

No	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian %
<b>Stakeholders Perspective</b>				
<b>SS.1 Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola Kemenko Marves yang Baik</b>				
<b>IK. 1</b>	Indeks Penilaian Mandiri Pengelolaan Reformasi Birokrasi	75	-	-

Sumber: SIK-M, 2020

Seperti pada tabel di atas capaian IKU Indeks PNPRB sampai dengan triwulan III untuk belum terealisasi. IKU ini ditargetkan pada triwulan IV tahun 2020. Berbagai kegiatan telah dilakukan untuk mencapai target kinerja diantaranya:

Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dari tanggal 24 s/d 30 Juni 2020 telah dilaksanakan secara baik dan tidak ditemui kendala yang berarti. Hal tersebut terwujud karena kerja sama yang baik dan solid antar tim pengelolaan reformasi birokrasi di lingkup Kemenko Marves. Dari hasil penilaian asessor unit Eselon I, Tim Penilai Internal (Inspektorat) bersama Tim RB Biro Hukum telah melakukan validasi secara objektif terhadap data dukung yang disampaikan. Adapun Persentase nilai PMPRB Pusat dan Unit Kerja Eselon I sebagai berikut:

**Tabel 7 Persentase nilai PMPRB Pusat dan Unit Kerja Eselon**

NO	UNIT KERJA	PERSENTASE
1.	PMPRB Pusat	86,59%
2.	PMPRB Sekretariat Kementerian Koordinator	90.7%
3.	PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	91.6%
4.	PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	92.7%
5.	PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	90.5%
6.	PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	94.0%

7.	PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	91.3%
8.	PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	91.4%
<b>Indeks RB Kementerian</b>		<b>86.41 %</b>

Sumber : Lembar Kerja Evaluasi PMPRB 2020 Kemenko Marves.

Capaian nilai PMPRB ini merupakan hasil penilaian mandiri unit yang nantinya akan dievaluasi kembali oleh Tim Evaluator dari Kementerian PANRB pada *Entry Meeting* Bulan Agustus 2020.

### Sasaran Startegis (SS) 2

#### Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Nilai indikator ini diperoleh dari hasil evaluasi Kemenpan RB terhadap implementasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tahun yang berjalan.

Terdapat 5 komponen penilaian SAKIP, yaitu:

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal; dan
- e. Realisasi kinerja.

Sasaran strategis ini memiliki satu (1) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

#### IKU. 2 Persentase Nilai Evaluasi SAKIP Kemenko Marves

Persentase Nilai Evaluasi SAKIP Kemenko Marves dicapai yaitu Nilai hasil evaluasi KemenPAN RB terhadap pelaksanaan SAKIP di Kemenko Marves atas aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Nilai SAKIP ini didapatkan dari Inspektorat. Hasil yang dikeluarkan melalui indikator ini adalah Persentase unit kerja Eselon II yang memperoleh nilai SAKIP Internal 70. Tujuan Indikator ini adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Indikator ini tidak memiliki capaian pada Triwulan III karena ditargetkan ditargetkan untuk dicapai pada Triwulan IV.

Namun demikian untuk mencapai nilai Evaluasi SAKIP Kemenko Marves sesuai dengan yang ditargetkan telah dilakukan kegiatan pendukung diantaranya:

1. Sosialisasi terkait Penajaman Indikator Kinerja untuk pejabat Eselon II Lingkup Kemenko Marves dengan Narasumber dari KemenPAN RB dan Inspektur;

2. Bimbingan teknis pengelolaan data kinerja ke dalam aplikasi SIK-M untuk SDM AKIP lingkup Kemenko Marves TA 2020;
3. Pembahasan Dokumen Perjanjian Kinerja Menteri, Setmenko dan Kedeputian;
4. Pelaksanaan Monitoring Kinerja berkala (setiap TW) bersama Inspektorat untuk memastikan data dukung yang sesuai;
5. Bimbingan teknis penyusunan pohon kinerja dengan narasumber dari Kementerian PAN & RB, akademisi dan internal Kemenko Marves;
6. Konsultasi mandiri dengan Tim Evaluator SAKIP KemenPAN RB terkait seluruh dokumen SAKIP yang juga telah diupload ke dalam system E-SAKIP Menpan Review
7. *Benchmarking* ke Pemkab. Banyuwangi untuk melihat *role model* pencapaian SAKIP terbaik dengan mendapatkan nilai 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2016.

### Capaian *Customer Perspective* s.d Triwulan III

No	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian %
<b>Customer Perspective</b>				
<b>SS.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman &amp; Investasi</b>				
<b>IK. 2</b>	Nilai SAKIP Kemenko Marves	70	-	-

### Sasaran Strategis (SS) 3

#### Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Efektif dan Harmonis

Peraturan Perundang-undangan dan harmonis yang efektif adalah peraturan perundang-undangan yang penyusunannya terkoordinasi dengan baik dan telah dilakukan harmonisasi. Ini adalah salah satu tujuan dari agenda penataan peraturan perundang-undangan dalam program Reformasi Birokrasi. Sasaran strategis ini dicapai dengan satu indikator kinerja (Nilai Hasil evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang Undangan) . Rincian Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

#### IKU 3. Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang-undangan

Indikator kinerja ini dicapai dengan Presentase jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang berhasil diharmonisasi berbanding dengan jumlah seluruh peraturan perundangan yang sedang disusun sebagaimana Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator (P3MK) dengan formula:

$$\frac{\text{Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang berhasil diharmonisasi}}{\text{Jumlah seluruh peraturan perundangan yang sedang disusun}} \times 100\%$$

Capaian untuk IKU ini ditargetkan pada triwulan IV, sehingga sampai dengan triwulan III, nilai hasil evaluasi belum dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

**Tabel:**  
**Capaian *Customer Perspective* s.d Triwulan III**

No	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian %
<b>Customer Perspective</b>				
<b>SS.3 Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kemaritiman &amp; Investasi yang Efektif &amp; Harmonis</b>				
<b>IK. 3</b>	Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang-undangan	3.5	-	-

Untuk mendukung pencapaian IKU nilai hasil evaluasi area penataan perundang-undangan Sekretariat Kemenko telah melakukan harmonisasi. Sampai dengan triwulan III Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Masuk dalam P3MK 14 Peraturan Menteri Koordinator, dan yang telah disahkan 8 Peraturan Menteri Kootrdinator.

Capaian IKU Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kemenko Marves yang selesai diharmonisasi/finalisasi telah diharmonisasikan dan difinalisasi sebanyak 2 Peraturan Menteri Koordinator sehingga jumlah yang telah ditetapkan sampai TW III adalah 8 Peraturan Menteri dengan Nilai capaian Peraturan Perundang-undangan yang selesai di harmonisasi/finalisasi (Periode Juli-September 2020):

$$8/14 \times 100\% = 57.1\%$$

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa Presentase Capaian IKU Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kemenko Marves yang selesai diharmonisasi/finalisasi adalah sebesar 57.1%.

#### **Sasaran Staretegis (SS) 4**

##### **Terwujudnya Layanan Birokrasi yang *Modern* dan Efektif Berbasis Eelektronik**

Sasarab ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya berbasis elektronik yang terpadu. Sasaran startaegis ini ini dinilai dengan satu indikator kinerja utama yaitu Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Rincian penjelasan adalah sebagai berikut:

#### **IKU 4 Indeks SPBE**

Penilaian SPBE dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB) dengan tujuan terwujudnya layanan birokrasi yang berkinerja tinggi, integratif, transparansi, dinamis dan inovatif serta Pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, adaptif, dan mudah diakses secara mobile internet, Cloud, IoT, Bigdata, dan AI. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 5 Tahun 2018. Permen ini mengatur tentang pedoman evaluasi

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (untuk kemudian disingkat SPBE). Evaluasi SPBE didasarkan pada Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Reformasi No 5 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Sampai dengan triwulan III Nilai SPBE belum tercapai, hal ini karena nilai SPBE akan dikeluarkan setelah penilaian dari KemenPANRB yang akan dilakukan pada bulan Desember. Seperti terlihat pada tabel:

**Tabel**  
**Capaian *Customer Perspective* s.d Triwulan III**

No	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian %
<b><i>Customer Perspective</i></b>				
<b>SS.4 Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis Elektronik</b>				
<b>IK. 4</b>	Indeks SPBE	3	-	-

Upaya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indeks SPBE, telah dilakukan kegiatan:

1. Penyiapan dokumen kuisisioner (bulan Oktober s.d. November 2020);
2. Penilaian mandiri SPBE dilakukan internal Kemenko Marves dan Tim dari KemenPANRB;
3. Penyusunan Pedoman TIK (bulan September – Oktober 2020);
4. Penyusunan SK Tim penilaian mandiri SPBE (bulan November) dan dalam proses tanda tangan Sekretaris Kemenko dan sebagai persiapan penilaian dari KemenPAN & RB pada awal bulan Desember 2020.

Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

\*) Target penilaian: Predikat Baik  
(indeks minimal 2,6)

Metode perhitungan indikator ini adalah sebagai berikut: Indeks SPBE sama dengan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain

Nilai indeks terdiri dari:

- Nilai Indeks Aspek, merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada aspek tertentu;
- Nilai Indeks Domain, merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada domain tertentu;
- Nilai Indeks SPBE, merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Skala indeks terdapat dalam data di samping

## Sasaran Strategis (SS) 5

### Tersedianya SDM Aparatur yang Profesional dan Kompeten

Sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian yang sangat penting dari proses dan tujuan dalam pencapaian kinerja Sekretariat kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sekretariat Kementerian Marves sangat memerlukan dukungan SDM yang profesional dan kompeten yang berkualitas guna memenuhi tugas dan fungsinya karena SDM merupakan faktor kunci dalam penyelenggaraan birokrasi. Sasaran strategis ini dijabarkan oleh satu Indikator Kinerja dengan rincian sebagai berikut:

#### IKU 5 Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kualitas ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi tindak lanjut dalam upaya pengembangan profesionalisme pegawai ASN.

Pengukuran indeks profesionalitas ASN ini pada dasarnya merupakan respons proaktif dan sekaligus mandat yang dilakukan oleh BKN untuk menjawab kebutuhan tingkat profesionalitas ASN melalui standarisasi pelaksanaan pengukuran indeks profesionalitas ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Tujuan pokok dari program ini untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan serangkaian langkah kegiatan identifikasi dan pemetaan terhadap hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN. Hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN.

Indeks Profesional ASN diperoleh dari hasil evaluasi ASN secara perseorangan dengan beberapa kriteria yang dapat diukur tingkat profesionalitas mencakup Dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin. Indeks Profesional tersebut diukur sesuai Peraturan BKN nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

**Tabel**  
**Capaian *Customer Perspective* s.d Triwulan III**

No	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian %
<b><i>Customer Perspective</i></b>				
<b>SS.5 Tersedianya SDM Aparatur yang Profesional &amp; kompeten</b>				
<b>IK. 5</b>	Indeks Profesionalitas ASN	71		

Sedangkan sebagai persiapan penilaian indeks profesionalitas ASN tahun 2020 yang nilainya akan dirilis BKN tahun 2021, upaya yang dilakukan per triwulan III, sudah memperoleh bobot 30%. Proses pelaksanaan Indeks Profesionalitas ASN Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah mulai dilakukan inventarisir data dimensi kinerja. Penghitungan melalui <https://ip-jasn.bkn.go.id>.

## Sasaran Strategis (SS) 6

### Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pengelolaan keuangan dan BMN yang akurat, tertib, dan taat azas adalah wajib hukumnya bagi instansi pemerintah. Melakukan pengawasan internal secara efektif merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan hal. Sasaran strategis ini dijabarkan melalui 1 (satu) indikator kinerja:

#### IKU 6 Opini BPK atas Laporan Keuangan

Tingkat opini BPK adalah pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Formula yang digunakan adalah hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur Tingkat Opini BPK Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. IKU ini telah ditargetkan dan direalisasikan pada triwulan III dengan capaian predikat Wajar Tanpa Pengecuali (WTP) atau tercapai 100% dari target.

Terwujudnya pengelolaan keuangan dan BMN secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Kemenko Marves.

Sampai dengan triwulan III belum tercapai target yang telah ditetapkan, hal ini menunggu hasil penilaian dari BPK pada tahun 2021.

**Tabel**  
**Capaian Customer Perspective s.d Triwulan III**

No	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian %
<b>Customer Perspective</b>				
<b>SS.5 Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman &amp; Investasi</b>				
<b>IK. 5</b>	Opini BPK atas Laporan	WTP	-	-

Namun demikian upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai opini BPK atas laporan WTP yaitu:

1. Adanya semangat yang kuat untuk mempertahankan opini WTP dari tahun sebelumnya (kondisi internal);
2. Semangat untuk menyamakan perolehan opini terbaik yang sama dengan opini yang diperoleh oleh sesama Kementerian Koordinator dan sebagai Kementerian yang baru dibentuk (kondisi eksternal);
3. Dukungan dan komitmen dari semua level pimpinan Kemenko Marves juga telah melaksanakan efektifitas yang berimbang pada efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran dan manusia) yang digunakan, dengan menerapkan penyusunan jumlah anggaran yang dibutuhkan secara proporsional dan akuntabel.

Adapun program atau kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan dari pencapaian target kinerja ini adalah:

1. Program meningkatkan kapasitas pengelola keuangan melalui kegiatan berupa sosialisasi, bimbingan teknis dan diklat;
2. Program melakukan update Standar Operasi Prosedur (SOP) dan aturan internal lainnya sebagai bentuk kepatuhan (compliance);
3. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk membantu atau sebagai tools dalam penyelesaian pekerjaan.

### Sasaran Strategis (SS) 7

#### Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Program & Anggaran serta Peraturan Perundang - Undangan yang Efektif

Terselenggaranya hal seperti disebutkan di atas adalah ketika terlaksananya peningkatan perencanaan program, efisiensi dan efektivitas anggaran, serta peraturan perundang-undangan yang efektif. Sasaran strategis ini dijabarkan oleh 2 indikator kinerja: **Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Program yang Sesuai dengan Ketentuan** dan **Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diharmonisasi pada Tahun Berjalan**

#### IKU 7 Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Program yang Sesuai Ketentuan

Dokumen perencanaan program yang sesuai ketentuan merupakan pedoman instansi pemerintah dalam melaksanakan program/kegiatan. Di dalam dokumen perencanaan program telah ditetapkan target kinerja dan besaran anggaran yang dibutuhkan. Unit kerja dalam melaksanakan program/kegiatan harus berpedoman pada dokumen perencanaan. Namun seringkali karena berbagai kondisi dan kebutuhan, baik eksternal maupun internal, rencana yang sudah dibuat harus berubah. Dokumen Perencanaan program Kemenko Marves yaitu:

1. Dokumen Renstra Kemenko Marves
2. Dokumen Renstra Unit Kerja Eselon I
3. Dokumen Renstra Unit Kerja Eselon II
4. Dokumen Renja Kemenko Marves
5. Dokumen Renja Unit Kerja Eselon I
6. Dokumen Renja Unit Kerja Eselon II
7. Dokumen DIPA

**Tabel**

#### **Capaian Internal Business Process Perspective s.d Triwulan III**

No	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian %
<b>Internal Business Process Perspective</b>				
<b>SS.7 Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran serta Peraturan Perundangan yang Efektif</b>				
<b>IK. 7</b>	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Program yang Sesuai Ketentuan	100	-	-

### **IKU 8 Persentase Peraturan Perundangan yang Diharmonisasi pada Tahun Berjalan**

Indikator Kinerja ini berarti jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang berhasil diharmonisasi berbanding dengan jumlah seluruh peraturan perundangan yang sedang disusun sebagaimana Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator (P3MK) dengan formula:

$$\frac{\text{Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang berhasil diharmonisasi}}{\text{Jumlah seluruh peraturan perundangan yang sedang disusun}} \times 100\%$$

Capaian untuk IKU ini ditargetkan pada triwulan IV, sehingga sampai dengan triwulan III, nilai hasil evaluasi belum dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

**Tabel**  
**Capaian *Internal Business Process Perspective* s.d Triwulan III**

No	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian %
<b><i>Internal Business Process Perspective</i></b>				
<b>SS.7 Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran serta Peraturan Perundangan yang Efektif</b>				
<b>IK. 8</b>	Persentase Peraturan Perundangan yang Diharmonisasi pada Tahun Berjalan	100	-	-

Untuk mendukung pencapaian IKU Persentase Peraturan Perundangan yang Diharmonisasi pada Tahun Berjalan Sekretariat Kemenko telah melakukan harmonisasi. Sampai dengan triwulan III Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Masuk dalam P3MK 14 Peraturan Menteri Koordinator, dan yang telah disahkan 8 Peraturan Menteri Koordinator.

Capaian IKU Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kemenko Marves yang selesai diharmonisasi/finalisasi telah diharmonisasikan dan difinalisasi sebanyak 2 Peraturan Menteri Koordinator sehingga jumlah yang telah ditetapkan sampai TW III adalah 8 Peraturan Menteri dengan Nilai capaian Peraturan Perundang-undangan yang selesai di harmonisasi/finalisasi (Periode Juli-September 2020):

$$8/14 \times 100\% = 57.1\%$$

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa Presentase Capaian IKU Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kemenko Marves yang selesai diharmonisasi/finalisasi adalah sebesar 57.1%.

**Tabel**  
**Capaian Internal Business Process Perspective s.d Triwulan III**

No	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian %
<b>Internal Business Process Perspective</b>				
<b>SS.7 Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Program dan Anggaran serta Peraturan Perundangan yang Efektif</b>				
<b>IK. 8</b>	Persentase Peraturan Perundangan yang Diharmonisasi pada Tahun Berjalan	100	-	-

### Sasaran Strategis (SS) 8

#### Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan yang Prima

Sasaran strategis ini dijabarkan dalam 4 Indikator Kinerja :

IKU. 9 Persentase Sistem Layanan Kepegawaian yang Baik

IKU. 10 Persentase Penyelesaian Tagihan atas Beban Negara yang Tepat Waktu

IKU. 11 Persentase Opini Publik yang Positif

IKU. 12 Persentase Pengadaan Barang & Jasa yang Tepat Waktu

Rincian penjelasan dan capaian masing-masing- masing IKU adalah sebagai berikut:

#### IKU. 9 Persentase Sistem Layanan Kepegawaian yang Baik

Maksud dari indikator ini adalah Persentase layanan kebutuhan administrasi pegawai yang diberikan dengan baik tepat waktu dan sesuai kaidah yang berlaku berbanding dengan seluruh layanan yang diberikan. Target capaian pada indikator kinerja ini adalah 80 %. Sampai dengan triwulan III IKU presentase layanan kepegawaian yang baik telah mencapai 75,97% dari target 80%. Seperti terlihat pada tabel:

**Tabel**  
**Capaian Internal Business Process Perspective s.d Triwulan III**

No	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian %
<b>Internal Business Process Perspective</b>				
<b>SS.8 Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan yang Prima</b>				
<b>IK. 9</b>	Persentase Sistem Layanan Kepegawaian yang Baik	80	75,97	94,96

Indikator jenis pelayanan kepegawaian yang baik untuk mencapai IKU dimaksud terdiri dari: Layanan kenaikan gaji berkala; Kenaikan pangkat; Mutasi; dan Pensiun.

Rincian Indikator capaian layanan kepegawaian seperti pada tabel berikut:

**Tabel 8**  
Rincian Indikator capaian layanan kepegawaian

KENAIKAN GAJI BERKALA			MUTASI		
Bulan	Jumlah	Realisasi	Bulan	Jumlah	Realisasi
Januari	53	53	Januari	1	0
Februari	0	0	Februari	0	1
Maret	13	13	Maret	0	0
April	5	5	April	4	0
Mei	0	0	Mei	2	4
Juni	6	6	Juni	10	0
Juli	1	1	Juli	5	4
Agustus	1	1	Agustus	4	4
September	2	2	September	9	6
Oktober	1	1	Oktober	8	1
November	1	0	November	0	0
Desember	23	0	Desember	0	0
<b>Total</b>	<b>106</b>	<b>82</b>		<b>43</b>	<b>20</b>
<b>77,36%</b>			<b>46,51%</b>		
KENAIKAN PANGKAT			PENSIUN		
Bulan	Jumlah	Realisasi	Bulan	Jumlah	Realisasi
Januari			Januari	2	2
Februari			Februari	1	1
Maret			Maret		
April	20	20	April		
Mei			Mei		
Juni			Juni		
Juli			Juli		
Agustus			Agustus		
September			September	1	1
Oktober	20	20	Oktober		
November			November	1	0
Desember			Desember		
	<b>40</b>	<b>40</b>		<b>5</b>	<b>4</b>
<b>100,00%</b>			<b>80,00%</b>		

#### **IKU.10 Persentase Penyelesaian Tagihan atas Beban Negara yang Tepat Waktu**

Persentase indikator kinerja ini didapat dengan melakukan perbandingan antara penyelesaian tagihan atas beban negara yang tepat waktu berbanding total tagihan beban negara. target nilai capaian untuk indikator ini pada tahun 2020 adalah 95%. Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Tagihan atas Beban Negara yang Tepat Waktu dengan formulasi (Penyelesaian tagihan atas beban negara yang tepat waktu / Total tagihan beban Negara) x 100%. Capaian IKU seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel**  
**Capaian *Internal Business Process Perspective* s.d Triwulan III**

No	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian %
<b><i>Internal Business Process Perspective</i></b>				
<b>SS.8 Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan yang Prima</b>				
<b>IK. 10</b>	Persentase Penyelesaian Tagihan atas Beban Negara yang Tepat Waktu	95%	95,59 %	

Penyelesaian tagihan Marves selama Triwulan III TA 2020 mencapai 95,59 %. Bobot penilaian dari indikator penyelesaian tagihan sejumlah 12. Berdasarkan bobot nilai tersebut, penyelesaian tagihan Marves memperoleh nilai akhir 11,47.

### **IKU. 11 Persentase Opini Publik yang Positif**

Berita yang mengandung opini positif terhadap Kemenko Marves adalah berita yang menggunakan diksi dan pemilihan bahasa yang mengunggulkan dan atau meninggikan pernyataan Kemenko Marves. Persentase opini publik yang positif adalah ukuran untuk menilai kualitas opini publik yang positif. Opini yang positif adalah opini yang menganggap bahwa kegiatan dan atau capaian yang dianggap baik, benar atau memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dan negara. Pelaksanaan media monitoring dilaksanakan untuk dapat melakukan analisa terhadap muatan pemberitaan yang positif, netral atau negatif. Media yang dijadikan basis penilaian adalah media online utama (mainstream) yang mempunyai pembaca dalam jumlah besar.

Jika berkaca pada tahun sebelumnya untuk periode waktu triwulan yang sama, Bagian Humas berhasil merealisasikan capaian pemberitaan positif bidang kemaritiman sebesar 76% (510 pemberitaan positif dari 671 total pemberitaan bidang kemaritiman) atau 79,29% (dengan memperhitungkan validitas data dukung) dari target yang ditentukan.

Target capaian paa indikator ini adalah 70% yang ditargetkan pada akhir tahun (triwulan IV). Formulasi dari IKU tersebut yaitu: (Jumlah opini public positif / Jumlah Opini Publik yang Diolah) X 100%

**Tabel**  
**Capaian *Internal Business Process Perspective* s.d Triwulan III**

No	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian %
<b><i>Internal Business Process Perspective</i></b>				
<b>SS.8 Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan yang Prima</b>				
<b>IK. 11</b>	Persentase Opini Publik yang Positif	70%	77,7 %	111%

Pada Triwulan III, presentasi opini positif sebesar 77,7% (4.743 opini positif dari total 6.100 pemberitaan)

### **IKU. 12 Persentase Pengadaan Barang & Jasa yang Tepat Waktu**

Capaian terhadap Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang Tepat Waktu didefinisikan Presentase jumlah pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu sesuai rencana umum pengadaan berbanding dengan total seluruh pengadaan barang dan jasa, dengan formulasi (Jumlah pengadaan barang dan jasa yang tepat waktu sesuai rencana umum pengadaan / Total seluruh pengadaan barang dan jasa) X 100%. Terlihat pada tabel capaian sampai dengan triwulan III.

**Tabel**  
**Capaian *Internal Business Process Perspective* s.d Triwulan III**

No	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian %
<b><i>Internal Business Process Perspective</i></b>				
<b>SS.8 Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan yang Prima</b>				
<b>IK. 12</b>	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang Tepat Waktu	100	60	60

Capaian sampai dengan triwulan III progres 60%, hal ini dikarenakan masih terdapat pengadaan barang/jasa dari belanja modal renovasi gedung yang masih dalam proses PBJ per 30 September 2020.

### **Sasaran Strategis (SS) 9**

#### **Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Baik**

Sasaran Strategis ini dijabarkan dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan penjelasan sebagai berikut:

### **IKU. 13 Jumlah Pedum Manajerial yang Ditetapkan**

Jumlah Pedum Manajerial yang ditetapkan yang terdiri 2 pedum di Biro Perencanaan, 2 Pedum di Bagian Kepegawaian, dan 2 Pedum di Biro Hukum. Tersedianya dokumen dan/atau rancangan administrasi untuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik adalah tersedianya dokumen pelaksanaan akuntabilitas pemerintahan, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan di Kemenko Bidang Kemaritiman.

Target capaian jumlah Pedum Manajerial pada thun 2020 adalah  $\geq 5$  pedum. Sehingga dari jumlah 6 pedum manajerial yang bisa dibuat 83,3% sehingga target bisa dikatakan tercapai.

**Tabel**  
**Capaian *Internal Business Process Perspective* s.d Triwulan III**

No	Nama IKU	Target	Realisasi	Capaian %
<b><i>Internal Business Process Perspective</i></b>				
<b>SS.9 Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Baik</b>				
<b>IK. 13</b>	Jumlah Pedum Manajerial yang Ditetapkan	>=5	3	60%

Capaian sampai dengan triwulan III sebanyak 3 pedum manajerial atau sekitar 60% dari target >= 5 pedoman manajerial. Selama triwulan III, sudah dilakukan:

1. Proses pengumpulan data dan bahan materi pembuatan pedoman umum pengembangan pegawai dan pedoman umum JPT serta diterbitkannya SK Nomor 5 tahun 2020 tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Pedoman Pengelolaan keuangan : SK KPA Nomor 46/KPA Tahun 2020 tentang biaya/belanja yang dapat dibebankan pada DIPA Kemenkomarves. SE Nomor 22 tahun 2020 tentang pelaksanaan teknis satuan biaya transportasi perjadiin di kemenkomarves
3. Serta penyusunan Buku Panduan Keuangan

### Sasaran Strategis (SS) 10

#### Terselenggaranya Pengelolaan BMN dan Layanan Sistem Informasi yang Baik

Sasaran strategis ini dijabarkan dan capaiannya diukur melalui 2 indikator yaitu:

IKU 14. Persentase Tingkat Ketaatan Penyampaian Laporan Barang Milik Negara

IKU 15 Persentase Tingkat Ketaatan Penyampaian Laporan Barang Milik Negara

Rincian penjelasan dan maksud masing-masing indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut;

#### IKU 14. Persentase Tingkat Ketaatan Penyampaian Laporan Barang Milik Negara

Presentase Laporan BMN di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi yang akuntabel dan tepat waktu. Barang milik negara adalah segala jenis sara prasarana yang diadakan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam melaksanakan masing masing tugasnya. Pengadaan Barang Milik Negara menggunakan anggaran dari pemerintah melalui uinstansi terkait, sehingga setiap BMN yang diserahkan untuk digunakan oleh aparatur perlu dilakukan monitoring melalui pelaporan. Ketaatan pelaporan akan membantu meperlancar setiap pekerjaan administrasi. Tahun 2020 indikator tersebut memiliki target capaian sebesar 100%. Indikator Kinerja tersebut telah tercapai pada Triwulan II, berdasarkan Surat Sesmenko Nomor B-0128/SESMENKO/MARVES/PL.03.04/2020 per tanggal 24 April 2020

## IKU.15 Pemenuhan Kebutuhan Minimal Aplikasi Umum yang Terintegrasi Lingkup Kemenko Marves

Indikator kinerja yang meliputi aplikasi umum dinilai melalui jumlah aplikasi umum yang diintegrasikan. Jumlah aplikasi umum yang diintegrasikan antara lain meliputi persuratan, kepegawaian, keuangan dan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rapat koordinasi, dengan tingkat integrasi layer pertama (yaitu data dan informasi) berupa *Single Sign On*. Target capaian pada indikator ini adalah sebesar 4 aplikasi. Pada triwulan III 2020 indikator ini tidak ditargetkan, namun ditargetkan untuk dicapai pada triwulan IV. Progres capaian sampai pada TW III adalah sebagai berikut:

### Integrasi pada level SSO

1. Marves HR (100% tersedia Web Service),
2. Marves Letter (25%),
3. Marves Prime (0%)
4. Email & cloud maritim

Aplikasi lainnya:

1. Marves Room (penyiapan Web Service),
2. Marves Vehicle (penyiapan Web Service)
3. Marves Asset (penyiapan Web Service).
4. Covid tracker



## Sasaran Strategis (SS) 11

### Tersedianya SDM yang Kompeten di Setmenko Marves

Sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian yang sangat penting dari proses dan tujuan dalam pencapaian kinerja Sekretariat Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sekretariat Kemenko Marves sangat memerlukan dukungan SDM yang profesional dan kompeten yang berkualitas guna memenuhi

tugas dan fungsinya karena SDM merupakan factor kunci dalam penyelenggaraan birokrasi. Sasaran Strategis dijabarkan melalui indikator kinerja **Persentase SDM yang Kompeten** dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

### **IK.16 Persentase SDM yang Kompeten**

Persentase SDM tersebut dikalkulasi dengan menghitung jumlah pejabat di Setmenko yang sesuai kompetensi sesuai tugas dan fungsinya. Target nilai capaian pada indikator ini adalah sebesar 75%. Indikator tersebut ditargetkan untuk tercapai dengan nilai persentase tersebut adalah pada akhir tahun (triwulan IV). Progres capaian Indikator tersebut adalah 60%, masih terdapat pengadaan barang/jasa dari belanja modal renovasi Gedung yang masih dalam proses PBJ per 30 September 2020.

### **Sasaran Strategis (SS) 12**

#### **Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Setmenko Marves**

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dan nilai capaiannya dihitung berdasarkan indikator kinerja yang dimiliki terdiri dari:

IKU.17 Nilai PMPRB Setmenko

IKU.18. Nilai SAKIP Setmenko

Rincian masing –masing indikator adalah sebagai berikut:

#### **IKU.17 Nilai PMPRB Setmenko**

Nilai tersebut diambil dari hasil penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assesement*) oleh Sekretariat Kemenko Bidang Kemaritiman & Investasi. Penilaian tersebut dilakukan oleh Inspektorat terhadap implementasi RB Eselon I (Setemenko). Nilai PMPRB yng ditargetkan untuk dicapai adalah sebesar 70. Namun nilai PMPRB ditargetkan untuk direalisasikan pada triwulan akhir (triwulan 4)

**Tabel 9 nilai PMPRB Unit Eselon I 2020**

NO	UNIT KERJA	PERSENTASE
1.	PMPRB Pusat	86,59%
2.	PMPRB Sekretariat Kementerian Koordinator	90.7%
3.	PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi	91.6%
4.	PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	92.7%
5.	PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi	90.5%
6.	PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan	94.0%

7.	PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	91.3%
8.	PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	91.4%
<b>Indeks RB Kementerian</b>		<b>86.41 %</b>

Sumber : Lembar Kerja Evaluasi PMPRB 2020 Kemenko Marves.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat melalui pelaksanaan PMPRB, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi memperoleh nilai PMPRB dengan nilai 90.7%. nilai capaian ini melebihi target yang ditetapkan yaitu senilai

Capaian nilai PMPRB ini merupakan hasil penilaian mandiri unit yang nantinya akan dievaluasi kembali oleh Tim Evaluator dari Kementerian PANRB pada *Entry Meeting* Bulan Agustus 2020.

### **IKU.18. Nilai SAKIP Setmenko**

Nilai evaluasi tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Sekretariat Kemenko Marves. Nilai SAKIP didapatkan melalui Nilai hasil evaluasi internal APIP terhadap pelaksanaan SAKIP di lingkup Setmenko Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang kemaritiman dalam upaya meningkatkan nilai SAKIP telah melakukan beberapa langkah seperti:

- a. Pada penyusunan dokumen renaksi, pembuatan pohon kinerja setiap unit dilakukan pendampingan oleh tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja
- b. Meningkatkan target kinerja Tahunan pada beberapa IKU seperti:
  - Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menargetkan capaian pada 2020 sebesar 3 dibandingkan tahun 2019 (target SPBE: 2)
  - Target tahunan nilai RB yang meningkat dari 70 menjadi 75 pada dokumen PK Setmenko
  - Meningkatnya target Persentase Pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan tahun (2019: 50%) sedangkan pada 2020 dengan adanya IKU Persentase SDM yang Kompeten (Target tahun 2020: 75%)
  - Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan dan harapan kinerja di Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi semakin meningkat.

### **Sasaran Strategis (SS) 13**

#### **Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Setmenko Marves**

Sasaran strategis ini dijabarkan melalui satu indikator kinerja **Nilai IKPA Setmenko** yang dijelaskan sebagai berikut:

### **IKU.19 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2020**

Indikator Kinerja memiliki target nilai capaian sebesar 95 yang ditargetkan apada akhi tahun. Namun berdasarkan pengamatan sampai pada TW III, IKPA tidak akan mencapai target disebabkan antara lain adanya perubahan SOTK, serta hal tersebut telah disampaikan kepada Sesmenko perihal tidak tercapainya target tersebut.

Formula yang digunakan dan dalam meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Berdasarkan penilaian IKPA (terdiri dari 13 indikator):

1. Revisi DIPA: Target Revisi / Jumlah DIPA
  2. Hal. III DIPA: (Realisasi – RPD Hal III DIPA) / RPD Hal III DIPA
  3. Pagu Minus: Jumlah Pagu Minus / Jumlah Pagu
  4. Retur SP2D: Jumlah Retur / Jumlah SP2D Terbit
  5. Capaian Output: (Output / Target) \*100
  6. Penyerapan Anggaran: %Penyerapan Anggaran / %Target Penyerapan
  7. Penyelesaian Tagihan: (Jumlah Tagihan Tepat Waktu / Jumlah SPM LS Kontraktual)\*100
  8. Data Kontrak: (Jml Data Kontrak Tepat Waktu / Seluruh Data Kontrak)\*100
  9. Pengelolaan UP: (Jml GUP dan PTUP Tepat Waktu / Jml Seluruh SPM GUP dan PTUP)\*100
  10. Pengelolaan LPJ: Jml LPJ Tepat Waktu / Jml Seluruh LPJ
  11. Dispensasi: Jml Dispensasi SPM / Total SPM yang disampaikan ke KPPN
  12. Kesalahan SPM: (SPM salah / Total SPM yang disampaikan ke KPPN)\*100
- Renkas/RPD: (Jml Renkas Tepat Waktu / Jml total Renkas)\*100

### **Kinerja Keuangan**

Nilai capaian kinerja realisasi keuangan pada tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 10 Realisasi Keuangan Sekretria Kemenko MARVES s.d TW III 2020**

Unit Kerja	Anggaran Awal	Revisi Anggaran	Anggaran Akhir	Belanja Netto	Sisa Belanja	Persen Realisasi
<b>Biro Umum</b>	(137.792.027.000)	(22.560.900.000)	(160.352.927.000)	81.467.752.517	78.746.478.456	50,89%
<b>Biro Perencanaan</b>	(23.015.367.000)	6.060.900.000	(16.954.467.000)	8.782.895.875	8.168.454.125	51,82%
<b>Biro Hukum</b>	(7.050.796.000)	620.000.000	(6.430.796.000)	2.807.611.509	3.614.937.491	43,79%
<b>Inspektorat</b>	(4.000.000.000)	710.000.000	(3.290.000.000)	1.378.775.894	1.900.793.830	42,23%
<b>Staff Ahli</b>	(1.483.454.000)	240.000.000	(1.243.454.000)	372.549.500	866.711.100	30,30%
	<b>(173.341.644.000)</b>	<b>(14.930.000.000)</b>	<b>(188.271.644.000)</b>	<b>94.809.585.295</b>	<b>93.297.375.002</b>	<b>50,45%</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa unit kerja eselon II pada Setmenko Kemaritiman dengan persentase realisasi tertinggi sesuai dengan pagu anggaran

terbesar adalah pada unit Biro Perencanaan (51,82%) Sementara unit kerja dengan persentase realisasi terkecil adalah Staf Ahli . Realisasi terhitung rendah karena terdapat kegiatan berupa kontraktual yang belum dibayarkan (proses pembayarannya ada hambatan/kendala terutama pada dokumen pertanggungjawaban/kwitansi), atau pembayarannya ditargetkan pada triwulan IV serta situasi Indonesia dan dunia yang sedang dilanda Pandemi COVID 19 yang memberikan dampak cukup besar pada capaian belanja anggaran. Pada Triwulan IV akan menjadi periode waktu bagi setiap unit kerja di Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani.

Secara total, persentase realisasi Setmenko Kemaritiman pada triwulan III TA. 2020 adalah 50,45%. Nilai ini lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran pada periode triwulan yang sama tahun 2019 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 11 Realisasi Keuangan Setmenko TW III 2019**

Kode	Program	Pagu	Realisasi	%
5601	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran Serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (Roum)	137.186.435.000	95.354.543.397	69,51
5602	Penyusunan Program, Anggaran, Persidangan, Akuntabilitas Kinerja, Hubungan Masyarakat (Rorein)	14.706.894.000	9.440.327.632	64,19
5603	Perancang Peraturan, Kerjasama, Tata Laksana Organisasi, Advokasi Hukum (BH)	6.762.929.000	5.611.291.922	82,97
5604	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Inspektorat)	3.379.234.000	2.594.647.126	76,78
5748	Rekomendasi Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman (Staf Ahli Menteri)	1.570.717.000	645.252.087	41,08
<b>Total</b>		<b>163.606.209.000</b>	<b>113.646.062.166</b>	<b>69,46</b>

Melalui hal tersebut dapat dilihat bahwa kinerja anggaran sampai pada triwulan III tahun 2020 dibandingkan triwulan III tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 19,01%.

## BAB IV PENUTUP

Upaya pencapaian Kinerja Setmenko sampai dengan Triwulan III 2020 menunjukkan progres yang cukup baik. Beberapa kegiatan dalam rangka mencapai target telah dilaksanakan. Namun demikian, nilai pasti capaian kinerja dalam rangka mewujudkan sasaran strategis baru dapat ditetapkan pada akhir Triwulan IV Tahun 2020.

Beberapa kendala dalam pencapaian target, baik keuangan maupun kinerja di Setmenko Kemaritiman adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan nomenklatur 2 biro dan beberapa eselon III dan IV. Perubahan ini menyebabkan sempat terjadi keraguan dalam penggunaan anggaran, apakah sesuai dengan mata anggaran serta dapat diterima oleh KPPN
- b. Terdapat eselon III dan eselon IV yang baru, sehingga pelaksana perlu melakukan adaptasi dalam pemahaman kerja, serta tugas dan fungsinya
- c. Sempat terjadi kevakuman pejabat sesuai dengan nomenklatur yang baru
- d. Masih kurangnya jumlah tenaga pegawai (terutama pelaksana teknis sesuai unitnya) Setmenko Kemaritiman serta unit eselon I lainnya di lingkup Kemenko Kemaritiman. Dapat dinyatakan bahwa seluruh indikator kinerja Setmenko memerlukan kerja sama dari seluruh unit kerja di kementerian.
- e. Terdapatnya beberapa penugasan dan atau kegiatan yang saling bersilangan fungsi dan target, atau penugasan yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan tidak dianggarkan.

Melalui laporan ini, diharapkan bisa menjadi umpan balik dalam proses penyusunan perencanaan kegiatan dan kinerja, sehingga SAKIP di Sekretariat Kemenko Kemaritiman dan Investasi dapat berjalan dengan baik khususnya di lingkup Setmenko. Melalui pelaksanaan SAKIP yang baik diharapkan Kemenko Kemaritiman serta melalui tugas fungsi Sekretariat Kemenko dapat merealisasikan sasaran dan target kegiatan yang telah diamanatkan. Sehingga tujuan akhirnya adalah masyarakat dapat merasakan manfaat yang baik dan signifikan akan keberadaan Kemenko Marves.

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

### TARGET KINERJA TAHUN 2020 SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUNAN
<i>Stakeholders Perspective</i>		
SS.1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Kapabel di Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi	1 Indeks Reformasi Birokrasi <u>Kemenko Marves</u> 75
<i>Customer Perspective</i>		
SS.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi	2 Nilai SAKIP <u>Kemenko Marves</u> 70
SS.3	Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kematriman dan Investasi yang Efektif dan Harmonis	3 Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang - Undangan 3.5
SS.4	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis <u>Eelektronik</u>	4 Indeks SPBE 3
SS.5	Tersedianya SDM Aparatur Yang Profesional dan Kompeten	5 Indeks <u>Profesionalitas ASN</u> 71
SS.6	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi	6 Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP
<i>Internal Business Process Perspective</i>		
SS.7	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Program & Anggaran serta Peraturan Perundang - Undangan yang Efektif	7 Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Program yang Sesuai dengan Ketentuan 100
		8 Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang <u>Diharmonisasi</u> pada Tahun Berjalan 100
SS.8	Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan yang Prima	9 Persentase Sistem Layanan Kepegawaian yang Baik 80
		10 Persentase Penyelesaian Tagihan atas Beban Negara yang Tepat Waktu 95
		11 Persentase Opini Publik yang Positif 70
		12 Persentase Pengadaan Barang & Jasa yang Tepat Waktu 100

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUNAN
SS.9	Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Baik	13	Jumlah <u>Pedum Manajerial</u> yang Ditetapkan	>=5
SS.10	Terselenggaranya Pengelolaan BMN dan Layanan Sistem Informasi yang Baik	14	Persentase Tingkat Ketaatan Penyampaian Laporan Barang Milik Negara	100
		15	Pemenuhan Kebutuhan Minimal Aplikasi Umum yang Terintegrasi Lingkup <u>Kemenko Marves</u>	4
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>				
SS.11	Tersedianya SDM yang Kompeten di <u>Setmenko Marves</u>	16	Persentase SDM yang Kompeten	75
SS.12	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di <u>Setmenko Marves</u>	17	Nilai <u>PMPRB Setmenko</u>	70
		18	Nilai <u>SAKIP Setmenko</u>	75
SS.13	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang <u>Akuntabel</u> di <u>Setmenko Marves</u>	19	Nilai <u>IKPA Setmenko</u>	95